



Manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK di Kota Bandung (*Studi Kasus Pada SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 9 Bandung*)

Rina Daryani¹, Deti Rostini², Ida Tejawiani³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Email: daryani.rina@gmail.com, detirostini@uninus.ac.id, idedtejawiani@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-20 Revised: 2022-04-15 Published: 2022-05-08 Keywords: <i>Management; Professional Certification Institute; Quality of Graduates; SMK.</i>	The research aims to get an overview of planning, organizing, implementing and evaluating, obstacles and efforts to overcome obstacles from LSP management in improving the quality of SMK graduates. The theory that underlies this research is George R. Terry's Management Principles and BNSP Standards on LSP. The research method used is descriptive analytic with a qualitative approach, while the research techniques are interviews, observation and study documentation. The findings of this study are: (1) LSP management planning in the form of preparation of work programs that include LSP goals and objectives, required activities, determination of required resources and their acquisition. (2) LSP organization refers to BNSP standards and is in accordance with management concepts, namely: application of standard setting process, personal appointment, and division of duties and authorities (3) Implementation of LSP management, namely organizational management and implementation of tests or assessments. Testing activities include pre-assessment and assessment. (4) Evaluation is carried out on two things, namely evaluation of assessment and evaluation of LSP management through internal and external audits. (5) Constraints faced in the management of LSP problems according to the school program schedule with BNSP, competence of both human and human resources and work problems are. (6) Efforts to overcome obstacles in LSP management are to improve communication and coordination of related parties and motivate individuals to increase competence independently. The conclusion of this study, the implementation of LSP management in SMK is sufficient to refer to the BNSP standard, and is in accordance with the management concept so that it is expected to improve the quality of SMK graduates.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-20 Direvisi: 2022-04-15 Dipublikasi: 2022-05-08 Kata kunci: <i>Manajemen; Lembaga Sertifikasi Profesi; Mutu Lulusan; SMK.</i>	Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, kendala serta upaya untuk mengatasi kendala dari manajemen LSP dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik penelitian yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah: (1) Perencanaan manajemen LSP berupa penyusunan program kerja yang memuat sasaran dan tujuan LSP, kegiatan pencapaiannya, penetapan sumberdaya yang diperlukan serta perolehannya. (2) Pengorganisasian LSP mengacu kepada standar BNSP dan sesuai dengan konsep dalam manajemen yaitu: terdapat proses penetapan standar, penunjukan personal, dan pembagian tugas dan wewenang (3) Pelaksanaan manajemen LSP, mengacu pada program LSP, yaitu manajemen organisasi dan pelaksanaan pengujian atau asesmen. Kegiatan Pengujian meliputi pra asesmen dan asesmen (4) Evaluasi dilakukan pada dua hal yaitu evaluasi kegiatan asesmen dan evaluasi manajemen LSP melalui audit internal dan eksternal. (5) Kendala yang dihadapi dalam manajemen LSP adalah masalah kesesuaian jadwal program sekolah dengan BNSP, kompetensi sumber daya baik dana maupun manusia dan masalah birokrasi. (6) Upaya dalam mengatasi kendala pada manajemen LSP adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memotivasi personal untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. Simpulan dari penelitian ini, penerapan manajemen LSP di SMK sudah cukup baik mengacu pada standar BNSP, serta sesuai dengan konsep manajemen sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan SMK.

I. PENDAHULUAN

Persoalan mutu pendidikan di Indonesia senantiasa menjadi sorotan, tuntutan akan lulusan

SMK yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam

pendidikan yaitu adanya deregulasi yang membuka peluang tenaga kerja luar negeri untuk bisa bersaing di dalam negeri. Begitu pun sebaliknya, tenaga kerja dalam negeri memiliki peluang untuk bisa bekerja di luar negeri, oleh karena itu persaingan di pasar kerja akan semakin berat, tuntutan tersebut dapat dipahami bila dikaitkan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang diberlakukan mulai tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Tujuan MEA salah satunya adalah meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus investasi, dan Arus tenaga kerja terlatih.

Usaha yang dilakukan di tuangkan dalam 4 pilar utama, yaitu: (1) ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata antar negara anggota. Adanya pengembangan usaha kecil menengah dan prakarsa integrasi ASEAN, terutama untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam atau yang sering disebut sebagai negara CMLV; (2) menjadi suatu pasar tunggal dan berbasis produksi internasional, dengan pengembangan aliran investasi dan modal yang lebih bebas, bebas barang dan jasa, serta mengembangkan tenaga kerja terdidik; (3) Menjadi suatu kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, dengan adanya perlindungan konsumen, peningkatan infrastruktur, kebijakan kompetisi, e-commerce, kebijakan perpajakan, serta hak atas kekayaan intelektual bagi negara anggota ASEAN; (4) Menjadi secara penuh menjadi suatu kawasan yang terintegrasi perekonomian global, dengan beberapa usaha pendekatan hubungan ekonomi dengan luar kawasan Asia Tenggara, serta peningkatan peran dalam jejaring produksi ekonomi global. MEA tentu saja memiliki dampak ganda terhadap aspek kompetisi, eksploitasi dan aspek ketenagakerjaan, pada sisi ketenagakerjaan, dampak positif adanya MEA adalah kesempatan kerja semakin luas, hal ini karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam.

Akses untuk keluar negeri pun lebih mudah, mencari pekerjaan menjadi lebih mudah tanpa adanya hambatan wilayah, para tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan bebas di negara anggota ASEAN sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, begitu juga sebaliknya.

Pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lulusan SMK ini. Pihak Sekolah sebagai pengelola sebaiknya melaksanakan manajemen sekolah berbasis mutu, dalam proses perencanaan sekolah melakukan analisis dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) serta mengumpulkan informasi/ analisis lingkungan eksternal dari DUDIKA yang ada di daerah serta bekerja sama dengan unsur terkait dan pemerintah daerah mengenai kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan yang mesti diajarkan dan dilatihkan kepada siswa. Pihak sekolah juga berupaya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang mengarah pada inisiatif dan kemandirian untuk mencapai aspek intelektual dengan pengembangan program kewirausahaan (*entrepreneur-ship*). Untuk mendukung proses pembelajaran, sekolah melengkapinya dengan unit produksi dan jasa sebagai sarana praktik kewirausahaan. Ini bisa bekerja sama dengan industri dan pemerintah dalam hal pelatihan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat/ konsumen. Pemerintah dan industri ikut serta mengembangkan program unit usaha SMK dengan memberi pinjaman modal kerja dan pelatih khusus yang disertai dengan pengawasan. Kepada BNSP Presiden mengintruksikan untuk melaksanakan: (1) Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK; (2) mempercepat sertifikasi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan (3) mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

Realisasi dari intruksi tersebut, Pemerintah membentuk dan mempercepat lisensi terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di tiap Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini guna mempercepat proses sertifikasi bagi lulusannya, agar kompetensi lulusan SMK dapat diakui secara regional ataupun bahkan sampai internasional. Implementasinya dilapangan banyak ditemukan permasalahan teknis baik berkaitan dengan pembentukan LSP di SMK maupun proses manajemen LSP itu sendiri. Terkait dengan persyaratan administrasi untuk proses lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), persyaratan

yang harus dipenuhi cukup ketat. Terutama untuk mendapatkan lisensi pada lingkup skema yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di tiap SMK. Begitu juga proses pelaksanaan atau manajemen LSP di sekolah. Halnya dilapangan sangat mungkin terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan manajemen LSP itu sendiri. SMK Negeri Bandung 3 dan SMK Negeri 9 Bandung merupakan sekolah yang telah memiliki LSP sejak pertama kali pemerintah mendorong pendirian LSP P 1 di sekolah menengah kejuruan, tepatnya pada tahun 2015. Pada awal pendirian setiap sekolah diarahkan untuk mendirikan LSP dengan skema sertifikasi yang berbeda. Seiring berjalannya waktu SMKN 3 dan SMKN 9 Bandung terus menambah lisensi untuk setiap kompetensi keahlian yang ada di sekolah. Bahkan saat ini semua kompetensi keahlian yang ada di sekolah tersebut telah terlisensi. LSP SMK Negeri 3 Bandung cukup produktif dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK). LSP tidak hanya menguji siswa SMKN 3 Bandung saja, tapi juga menguji sekolah jejaring seperti SMK Binawarga dan SMK Yapari Aktripa. Begitu juga LSP SMK Negeri 9 Bandung, sering menginisiasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan LSP. Bahkan selama beberapa tahun ketua LSP SMK Negeri 9 Bandung menjadi Ketua Forum LSP Jawa Barat. Selain itu LSP SMK Negeri 9 juga menyelenggarakan uji kompetensi untuk beberapa sekolah jejaring.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena tentang Manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK di Kota Bandung, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan kepada rumusan masalah penelitian yang menuntut peneliti melakukan eksplorasi dalam memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui hubungan yang intensif dengan sumber data, lokasi penelitian ditetapkan di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung. Adapun yang menjadi alasan penetapan tempat penelitian tersebut adalah karena sekolah tersebut sudah memiliki LSP P1 yang terlisensi oleh BNSP serta termasuk SMK revitalisasi di kota Bandung, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Penelitian di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung

1. Perencanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 3 Bandung

Perencanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK Negeri 3 Bandung dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK secara umum tergambar dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Ketua LSP, Wakil Manajemen Mutu (WMM), Waka Kurikulum dan Kaprog/Kakom. Kelengkapan informasi juga diperoleh dari studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan yang terdiri dari, RKJM, RKT/RKS, KTSP dan Program Kerja Unit Kerja, menurut ketua LSP SMK Negeri 3 Bandung membuat perencanaan secara berjenjang. Pertama, perencanaan berada pada level yang lebih umum yaitu pada perencanaan sekolah. Perencanaan ini dilakukan di awal tahun pelajaran melalui rapat yang melibatkan pihak manajemen dan komite sekolah. Hasil rapat ini menjadi bahan dalam merumuskan RKJM, RKT dan RKAS sekolah. Diawal tahun ajaran kepala sekolah bersama manajemen menetapkan RKT dan RKAS sebagai rujukan atau patokan dalam merumuskan program kerja pada unit kerja masing-masing, hasil analisis ini melahirkan perencanaan pada tingkat organisasi sekolah berupa visi, misi, tujuan sekolah, semua itu dituangkan dalam RKJM, selanjutnya RKJM diuraikan lagi lebih spesifik dalam program-program yang dituangkan dalam RKT dan RKAS. Kedua, perencanaan dirumuskan pada organisasi LSP, perencanaan intern ini juga menetapkan visi, misi dan tujuan LSP. Perencanaan itu dirumuskan dalam bentuk RENSTRA, perumusan ini mengacu kepada visi dan misi sekolah serta RKT dan RKAS sekolah, untuk menjabarkan visi misi dan tujuan, LSP menyusun Program kerja.

2. Perencanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 9 Bandung

Perencanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK Negeri 9 Bandung dalam Meningkatkan Mutu Saing Lulusan SMK secara umum tergambar dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Ketua LSP, Wakil Manajemen Mutu (WMM),

Waka Kurikulum dan Kaprog/Kakom. Juga studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan yang terdiri dari, RKJM, RKT/RKS, KTSP dan Program Kerja yaitu Menurut ketua LSP, LSP SMK Negeri 9 Bandung membuat perencanaan mengacu kepada Visi dan misi sekolah. Pertama, LSP Menyusun visi dan misi LSP yang merupakan penjabaran visi misi sekolah. Penyusunan visi dan misi sekolah memang tidak dilakukan setiap tahun, tetapi untuk jangka waktu lima tahun. Visi misi LSP dijabarkan lebih spesifik lagi dalam rumusan tujuan LSP. Kedua, perencanaan berupa program kerja LSP. Dalam program kerja ini LSP memuat semua perencanaan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan LSP. Pada LSP SMKN 9 Bandung, perumusan program kerja mengacu kepada visi dan misi sekolah serta visi misi LSP. Program kerja juga disusun setelah melakukan analisis terhadap berbagai kebutuhan organisasi. Hal itu menyangkut analisis kepengurusan, jumlah asessor yang dimiliki, masa berlaku sertifikat asessor, evaluasi pelaksanaan PSKK di dalam maupun SMK jejaring, serta analisis teknis berkaitan dengan sarana dan pemutakhiran teknologi informasi. Hasil analisis ini menghasilkan program yang mengutamakan prioritas program, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki LSP.

3. Pengorganisasian Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pengorganisasian LSP SMK 3 Bandung dan SMK 9 Bandung dirumuskan mengacu kepada standar BNSP. Ketua LSP ditunjuk oleh dewan pembina dalam hal ini Kepala Sekolah. Penunjukkan ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah juga menetapkan pengurus LSP, yang secara administratif mendapatkan SK dari ketua LSP. LSP SMK Negeri 3 Bandung dan SMK 9 Bandung memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari pembina, penanggung jawab, ketua LSP, manajer administrasi, manajer sertifikasi, manajer manajemen mutu dan ketua admin IT. LSP juga memiliki asessor pada setiap kompetensi keahlian yang telah terlisensi. Persyaratan menjadi asessor adalah mereka yang telah

memiliki sertifikat kompetensi asessor yang dikeluarkan oleh BNSP. SMK Negeri 3 Bandung memiliki asessor untuk 5 kompetensi keahlian. LSP memantau dan memelihara masa aktif sertifikat kompetensi asessor. Asessor yang perlu melakukan RCC atau perpanjangan sertifikat, difasilitasi dan didanai oleh sekolah dan oleh LSP.

4. Pelaksanaan Pengujian Lembaga Sertifikasi Profesi di SMKN 3 Bandung

Pelaksanaan manajemen LSP SMK Negeri 3 Bandung mengacu kepada tujuan dan program kerja yang telah ditetapkan, berkenaan dengan penambahan skema sertifikasi, LSP melaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Mulai 2018, secara bertahap LSP menambah skema sertifikasi, tahun 2018 ada 3 kompetensi keahlian yang tersertifikasi yaitu Multi Media, Administrasi Perkantoran, dan Usaha perjalanan Wisata. Pada tahun 2019 dan 2020, penambahan skema dilakukan pada kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran, Kompetensi Akuntansi, Kompetensi keahlian Pemasaran, dan kompetensi Keahlian Usaha perjalanan Wisata. Pada tahun 2021 penambahan skema pada Kompetensi Keahlian Pemasaran dan Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, pada tahun 2022 target telah tercapai 100% sesuai dengan rencana, program lain yang dilaksanakan adalah pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia. Kegiatannya adalah pelatihan asesor untuk memenuhi target penambahan jumlah asesor. LSP secara proaktif mencari informasi untuk kegiatan pelatihan atau RCC asessor, semua diupayakan terlaksana sebelum batas waktu yang ditetapkan, pada tahun 2019 jumlah asesor telah sesuai dengan target yaitu berjumlah 49 Orang. Pelaksanaan Manajemen LSP yang paling inti yaitu pengujian pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya membutuhkan persiapan yang matang, serta sinergi dengan berbagai pihak, komponen yang terlibat yaitu pengurus LSP, penguji (Asesor), siswa yang diuji (Asesi), perangkat asesmen, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Asesor terdiri dari Asesor Kompetensi dan Asesor Kepala (*Lead Assesor*) yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan asesmen pada kompetensi tertentu dibuk-

tikan dengan sertifikat asesor. Peserta Asesmen Kompetensi (Asesi) adalah siswa XII. Pada tahun 2020 dan 2021, LSP SMKN 3 Bandung melaksanakan asesmen dalam Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada semua kompetensi keahlian. Pertama, Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Negeri 3 Bandung dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2020 dengan jumlah asesi 70 peserta. Kedua, Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 3 Bandung dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2020 dengan jumlah asesi 64 Orang dengan Asesor LSP SMKN 11 Bandung. Ketiga, Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 3 Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Oktober 2020 bertempat di SMK Negeri 3 Bandung dengan Asesor LSP P1 SMK Negeri 11 Kota Bandung dengan Jumlah Peserta 70 orang. Keempat, kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 3 Bandung dilaksanakan pada tanggal 26,27, 29,30 Oktober 2020 dengan asesor LSP SMKN 11 Kota Bandung dan PT Sumber Alfaria Trijaya, TBK. Kelima, pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata pada tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020.

5. Pelaksanaan Sertifikasi Profesi LSP di SMK Negeri 9 Bandung

Pelaksanaan dalam manajemen LSP SMK Negeri 9 Bandung mengacu kepada program kerja yang telah dibuat, kegiatannya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan terutama berkaitan dengan pelaksanaan pengujian atau asesmen. Kegiatan yang berkaitan dengan manajemen LSP disesuaikan dengan yang tersusun dalam perencanaan yaitu pembenahan dokumen mutu yang berkaitan dengan pedoman mutu dan penyiapan SOP, pelaksanaan RCC assessor serta kegiatan peninjauan untuk penambahan jejaring, berikutnya juga penambahan dan pembenahan pasilitas LSP. Kegiatan lainnya adalah penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memenuhi persyaratan yang baik (*good practice*), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan metoda asesmen

kompetensi yang akan dilaksanakan. LSP SMK Negeri 9 Bandung memiliki ruang serta fasilitas yang bisa ditetapkan sebagai TUK sewaktu, sehingga untuk pelaksanaan asesmen, LSP dapat melakukan penunjukan dan verifikasi TUK tersebut untuk digunakan dalam asesmen.

6. Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 3 Bandung

Kegiatan evaluasi dalam lembaga LSP terdiri atas dua hal yaitu evaluasi terhadap penyelenggaraan pengujian atau Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dan evaluasi terhadap manajemen LSP secara keseluruhan. Evaluasi terhadap penyelenggaraan PSKK dilakukan setelah selesai pelaksanaan PSKK dan hasilnya dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. Aspek aspek yang dievaluasi adalah peristiwa di tempat pengujian yaitu; (1) kinerja assessor, (2) kedisiplinan asesi, (3) kelancaran penggunaan alat atau sarana, dan (4) ketepatan waktu pengujian. Semua ini dapat dijadikan umpan balik atau masukan bagi penyelenggaraan PSKK berikutnya. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen LSP. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk audit internal dan audit eksternal. Kegiatan audit intenel dijadwalkan sekali dalam satu tahun dan dilakukan oleh personil LSP itu sendiri. Kegiatan audit eksternal, dilakukan oleh BNSP. Evaluasi juga bisa dilihat dari lulusan, SMK Negeri 3 Bandung memiliki data penelusuran lulusan yang menggambarkan keterserapan lulusan yang merepresentasikan mutu, yang merupakan hasil dari berbagai proses pembelajaran dan pengujian. Data per Oktober 2020 menunjukan bahwa 42% lulusan telah bekerja, 4 % berwirausaha, dan 32% melanjutkan ke perguruan tinggi. Secara lebih terperinci diuraikan sebagai bersedih: Lulusan Kompetensi keahlian Multi Media yang bekerja sebanyak 32%, berwirausaha 3 % dan melanjutkan 39%, lulusan Kompetensi Keahlian UPW bekerja 44%, berwirausaha 3% dan melanjutkan sebesar 35%, selain evaluasi tersebut, pihak terkait juga memberikan masukan sebagai bentuk evaluasi terhadap LSP, masukan tersebut biasanya diberikan oleh masyarakat dan DUDIKA.

7. Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 9 Bandung

Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 9 Bandung melaksanakan evaluasi terhadap lembaganya melalui berbagai kegiatan. Pertama evaluasi yang berkaitan dengan inti dari bisnis proses LSP, yaitu penyelenggaraan pengujian. Penilaian ini dilakukan setiap selesai pelaksanaan pengujian di sekolah. Kedua, merupakan evaluasi terhadap keberlangsungan manajemen organisasi. Hal ini dilakukan melalui kegiatan audit internal dan audit eksternal. Pada penilaian kegiatan, beberapa aspek menjadi perhatian. Mulai dari kesesuaian penjadwalan, koordinasi antar manajemen, ketersediaan asessor, kelancaran penyediaan dan verifikasi TUK, kesiapan asesi serta kesiapan pendanaan. Hasil penilaian menjadi catatan sebagai masukan untuk pelaksanaan PSKK berikutnya. Hal-hal yang dianggap masih kurang menjadi pertimbangan untuk diperbaiki. Kegiatan evaluasi lainnya, LSP melaksanakan audit internal. Pelaksanaan audit internal mengacu kepada standar yaitu PBNSP 208-2014. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan surat keputusan oleh ketua LSP tentang pelaksanaan audit internal. Selanjutnya Ketua LSP membuat surat tugas kepada pengurus untuk melaksanakan kegiatan audit internal, baik bertindak sebagai auditor maupun auditee. Untuk panduan pelaksanaan kegiatan, Ketua LSP juga membuat jadwal pelaksanaan kegiatan audit. Bidang kerja yang diaudit adalah bidang mutu, bidang administrasi, bidang sertifikasi, dan ketua LSP. Setelah pelaksanaan audit, auditor menyerahkan laporan kegiatan audit internal kepada bidang mutu. Berdasarkan laporan audit internal tersebut, bidang mutu menjadwalkan serta mengoordinasi kegiatan rapat kaji ulang manajemen. Materi yang dibahas dalam rapat mengacu kepada laporan hasil audit internal, terutama laporan ketidaksesuaian. Hasil rapat kaji ulang manajemen dapat berupa rekomendasi kepada bidang terkait untuk keperluan koreksi manajemen. Kegiatan evaluasi selanjutnya adalah audit eksternal. Kegiatan ini dilakukan oleh auditor dari BNSP, jadwal pelaksanaan dan materi audit ditetapkan oleh BNSP, dan disampaikan pada waktu tertentu sebelum pelaksanaan.

Materi yang diaudit pada audit eksternal sama dengan materi audit internal. Kegiatan audit eksternal ini pernah dilaksanakan satu kali pada tahun 2019. Hasilnya menetapkan LSP SMKN 9 Bandung masih tetap memperoleh lisensi dari BNSP.

8. Kendala yang dihadapi LSP SMK Negeri 3 Bandung

LSP SMKN 3 Bandung menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, berdasarkan informasi dari informan ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, permasalahan sumber daya manusia, personal yang terlibat dalam organisasi adalah guru yang memang telah memiliki batasan tupoksi yang jelas. Sebagai guru tugas utama mereka adalah melaksanakan proses pembelajaran. Namun pada tugas lain mereka juga harus menjalankan fungsinya sebagai pengurus LSP. Hal ini menjadi bagian dari kendala yang perlu disiasati oleh sekolah dalam pengorganisasian, dengan kata lain *delivery time* menjadi permasalahan. Kedua, permasalahan jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Ke kompetensi Kerja (PSKK). Kegiatan PSKK sering berkaitan dengan program yang diselenggarakan oleh BNSP. Permasalahannya, penjadwalan program penerimaan bantuan dari BNSP untuk pelaksanaan PSKK terkadang tidak sejalan dengan jadwal pengujian yang ada di sekolah, terkadang penawarannya datang setelah kegiatan pengujian dilaksanakan. Hal ini biasanya karena birokrasi memang tidak pendek. Ketiga, pemenuhan sarana prasarana. Hal ini berkenaan dengan pemenuhan ruangan serta fasilitas LSP yang representatif sesuai dengan standar. Pada dasarnya ruang LSP harus memenuhi standar ukuran ruang, serta perlengkapan yang harus ada di dalamnya. Sekolah masih mengupayakan hal ini supaya sesuai standar. Kelima, yang merupakan kendala dalam dukungannya terhadap program LSP adalah tidak meratanya pemahaman warga sekolah juga DUDIKA terhadap fungsi dan manfaat sertifikat LSP, beberapa perusahaan besar rata-rata telah familier dan memberikan penghargaan yang proporsional terhadap pegawai yang memiliki sertifikat LSP, namun beberapa industri kecil belum memahami hal tersebut.

9. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 9 Bandung

Menurut Ketua LSP ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pengelolaan organisasi. Kendala tersebut ada pada berbagai fungsi manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: Pertama, kendala yang dihadapi dalam perencanaan adalah lebih pada penetapan sumber dana dan besarnya. Pada perencanaan telah ditetapkan besaran tersebut, namun sebagiannya masih bersifat spekulasi. Artinya Ketika perencanaan dibebankan pada dana partisipasi masyarakat, pada realisasinya sangat bergantung pada dana yang masuk ke sekolah. Jika dana dari masyarakat tidak masuk maka kegiatanpun menjadi terhambat. Kendala lain adalah target jumlah asesi agak sulit ditetapkan karena pendanaan lebih mengandalkan pada program atau bantuan dari BNSP. Kedua, kendala dalam pengorganisasian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Sekolah Menengah Kejuruan, LSP memiliki standar mengenai kemampuan, pengalaman dan kualifikasi personal pengurus, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi atau standar tersebut dibutuhkan dana yang relatif besar. Maka masalah dana untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi personal menjadi permasalahan juga. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan masa berlaku sertifikat asesor yang telah habis sehingga perlu diperpanjang. Biaya perpanjangan sertifikat ini juga cukup besar. Jika sekolah belum mampu mendanai ini menjadi masalah juga bagi keberadaan asesor di LSP. Ketiga, kendala dalam pelaksanaan PSKK berhubungan dengan besarnya dana penyelenggaraan asesmen. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Sekolah Menengah Kejuruan bukan lembaga yang berorientasi bisnis.

10. Solusi mengatasi kendala manajemen LSP SMK Negeri 3 Bandung

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran produktif berstandar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK Negeri 3 Bandung sesuai dengan hasil

wawancara dengan Ketua Kompetensi Keahlian dan Ketua LSP, serta studi dokumentasi diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut: Berkaitan dengan sumber daya manusia, LSP mencoba menciptakan suasana kekeluargaan agar pengurus bersedia bekerja melebihi jam kerja, hal ini diharapkan dapat mengantisipasi kesibukan karena tugas utama atau rangkap jabatan yang dimiliki. LSP juga proaktif mencari informasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengurus yang bisa dilakukan secara daring dan tidak berbayar, selain itu untuk penyiapan dokumen penting untuk lisensi, Pada bulan Juni 2018 LSP SMK Negeri 3 Bandung mengikuti bimbingan teknis penyusunan dokumen menuju lisensi dalam penambahan ruang lingkup seiring dengan dilakukannya pembaruan di personil. LSP dan pihak kurikulum bekerja sama mengatasi masalah penjadwalan. Untuk tetap bisa melaksanakan pengujian bahkan sekolah rela melakukan pengujian ganda yaitu pengujian oleh industri sekaligus juga pengujian oleh LSP, sepertinya hal itu merupakan hal yang tidak efisien, tapi sekolah mengambil manfaat dari kedua pengujian tersebut, berkaitan dengan permasalahan pemenuhan sarana prasarana, LSP selalu berkoordinasi dengan Waka Sarana, LSP menerima pemenuhan sarana secara bertahap. Terakhir, LSP khususnya dan Sekolah pada umumnya mencoba meningkatkan pemahaman pihak-pihak terkait mengenai pentingnya LSP, kepada Dudika pihak sekolah berupaya menyampaikan hal tersebut melalui guru pembimbing pada saat siswa mengikuti prakerin, kepada masyarakat sekolah menyampaikannya melalui kegiatan rapat komite.

11. Upaya mengatasi kendala dalam Manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 9 Bandung

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran produktif berstandar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK Negeri 9 Bandung sebagai berikut: Pertama, untuk mengatasi kendala pada perencanaan pihak LSP secara sinergi terus berkoordinasi terutama dengan kepala sekolah, dengan pihak terkait baik

itu dengan unit-unit lain yang ada di sekolah maupun dengan komite sekolah untuk mencari jalan keluar berkenaan dengan pendanaan untuk kegiatan pengujian atau PSKK. Hal tersebut memang menjadi agenda berkelanjutan dengan sosialisasi yang baik kepada orang tua siswa mengenai manfaat dan keuntungan sertifikasi profesi. Sehingga orangtua siswa mendukung pendanaan untuk kegiatan uji sertifikasi profesi bagi siswa. Pada program selanjutnya perencanaan pendanaan menjadi lebih jelas. Kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengorganisasian, khususnya berkaitan dengan pendanaan personal pengurus dan asesor, LSP proaktif kepada sekolah untuk bisa mendanai pemenuhan tersebut, pada sisi lain LSP juga memberikan dorongan atau motivasi kepada asesor khususnya untuk mau mengupgrade diri secara mandiri tanpa bergantung kepada LSP atau sekolah. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan, LSP meminta pihak sekolah untuk benar-benar intens dan selalu bekerja sama terutama dengan orang tua siswa, sehingga mereka dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi sertifikasi oleh LSP. Hal ini menjadi agenda dalam kegiatan rapat orang tua siswa pada tahun ajaran baru, untuk mengantisipasi masalah dana kegiatan ini seringkali Pengurus LSP menyiapkan dana talangan melalui pinjaman ke sekolah, ke koperasi atau bahkan menggunakan dana pribadi.

B. Pembahasan

1. Perencanaan (*Planning*)

Empat fungsi manajemen yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Dengan demikian sebelum organisasi dijalankan, perencanaan ini harus telah dirumuskan dan ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan lapangan menyangkut perencanaan bahwa LSP SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung telah menerapkan manajemen yang baik dalam perencanaan. Hal ini tercermin dengan indikator-indikator: terdapat perumusan tujuan, baik visi, misi maupun tujuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi baik tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan; Terdapat rancangan tindakan-tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan; Terdapat rincian sumber daya yang diperlukan serta sumber perolehannya; Terdapat rancangan implementasinya berkaitan dengan penjadwalan serta indikator untuk mengukur ketercapaiannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi kedua dalam fungsi manajemen adalah pengorganisasian, LSP SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung telah menerapkan manajemen yang baik dalam pengorganisasian. Struktur organisasi disusun dengan mengacu pada aturan yang berlaku yaitu Kepala Sekolah sebagai dewan pengarah menunjuk dan menetapkan Ketua LSP. Penunjukan ini dilakukan dengan standar kualifikasi, kompetensi dan pengalaman personal. Prosedur penunjukan seperti ini akan memungkinkan LSP menunaikan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan LSP sekaligus mendukung visi, misi dan tujuan sekolah. Pada tahap selanjutnya, Ketua LSP juga menetapkan atau menunjuk pengurus LSP dengan mengacu pada kualifikasi, kompetensi dan pengalaman. Semua pengurus mendapatkan struktur hierarki serta tupoksi yang jelas. Hal itu digambarkan dalam struktur organisasi dan uraian tugas terdokumentasikan dan terdistribusikan dengan baik.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dalam manajemen LSP SMK baik di SMKN 3 maupun SMKN 9 Bandung, mengacu kepada program kerja yang telah dibuat, kegiatannya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan terutama berkaitan dengan pelaksanaan pengujian atau asesmen. Kegiatan yang berkaitan dengan manajemen yaitu pembenahan dokumen mutu yang berkaitan dengan pedoman mutu dan penyiapan SOP, pelaksanaan RCC assessor serta kegiatan penjajagan untuk penambahan jejaring. Berikutnya juga penambahan dan pembenahan fasilitas LSP. Kegiatan inti dari LSP adalah pelaksanaan asesmen sertifikasi profesi. Kegiatan ini sebagiannya masih berkaitan dengan program bantuan yang diberikan oleh BNSP. Berdasarkan pengamatan terhadap dua sekolah ini, ternyata memiliki ketergantungan yang berbeda mengenai penetapan jumlah asesi. Bagi sekolah

yang murni menyandarkan pendanaan kepada BNSP, pelaksanaan pengujian bergantung pada pendanaan dari BNSP. Jika sudah jelas mendapatkan bantuan dari BNSP, barulah LSP menyiapkan segalanya.

4. Evaluasi (*Evaluating*)

Kegiatan evaluasi dalam lembaga LSP terdiri atas dua hal yaitu evaluasi terhadap penyelenggaraan PSKK dan kedua evaluasi terhadap manajemen Lembaga Sertifikasi secara keseluruhan. Evaluasi terhadap penyelenggaraan PSKK, ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan PSKK dan hasilnya dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. Hal ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kinerja dari sebuah kegiatan. Pada laporan tersebut dituangkan permasalahan yang muncul yang ditemukan dalam pelaksanaan, selanjutnya diupayakan tindakan perbaikannya jika hal itu bisa dilakukan segera dan bisa dikoreksi secara internal, namun jika perbaikan tidak bisa dilaksanakan secara internal maka dirumuskan saran perbaikan yang di-tujukan kepada pihak berkepentingan. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan penerapan manajemen dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Kegiatan audit internal terlaksana sesuai dengan program kerja dan mengikuti SOP yang ada di LSP. Namun, kompetensi pelaksana audit belum tersertifikasi seluruhnya. Hal tersebut masih dapat diantisipasi karena SOP yang tersedia cukup jelas sehingga mudah untuk dilaksanakan.

5. Kendala dan kelemahan

Permasalahan yang dihadapi dalam manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK adalah masalah kesesuaian program sekolah dengan pemerintah, masalah sumber daya baik manusia maupun dana, masalah birokrasi dan pemahaman pihak terkait tentang sertifikasi oleh LSP. Permasalahan program, seringkali program dari pemerintah tidak sinkron dengan penjadwalan uji kompetensi yang ada di sekolah, hal ini berkaitan dengan perbedaan birokrasi pada masing masing Lembaga. BNSP sebagai Lembaga yang selalu mempunyai program bantuan untuk penyelenggaraan pengujian oleh LSP di SMK, memiliki penjadwalan dan beracuan pada

tahun anggaran, sedangkan sekolah memiliki program mengacu kepada kalender akademik serta tahun ajaran. Selama ini LSP pada SMK yang menyesuaikan dengan program bantuan dari BNSP, hal ini diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara program BNSP dengan program Pendidikan di SMK. Hal lain yang juga menjadi masalah adalah pemahaman DUDIKA tentang sertifikasi profesi yang belum merata, perusahaan-perusahaan besar memang sudah familier dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh LSP, namun perusahaan kecil masih banyak juga yang belum memperhatikan hal tersebut.

6. Solusi untuk mengatasi kendala

Ada beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam manajemen LSP di SMK. Dari beberapa masalah tersebut ada yang bisa ditemukan solusinya dan dilaksanakan secara internal oleh sekolah. Namun, ada juga kendala yang tidak bisa ditangani secara internal, beberapa masalah yang dapat dicari solusinya:

- 1) Permasalahan program atau penjadwalan kegiatan PSKK yang tidak sinkron dengan bantuan dari BNSP. LSP secara cepat melakukan koordinasi dengan pihak untuk mengantisipasi penjadwalan untuk kegiatan.
- 2) Berkaitan dengan pemenuhan standar kompetensi personal, LSP memotivasi personal untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, serta berupaya memperoleh dukungan dan dari sekolah. Kedua upaya ini memang riskan tidak begitu berhasil, proses peningkatan kompetensi secara mandiri memungkinkan personal berhitung untung ruginya secara finansial. Biaya pelatihan untuk pengurus maupun untuk asesor cukup tinggi, sementara itu keterpakainnya dalam pengujian memang terbatas, apalagi proses pengujian yang dilakukan tidak dilakukan oleh banyak sekolah SMK.
- 3) Ketiga, Permasalahan birokrasi biasanya bersifat eksternal. Berkaitan dengan birokrasi keuangan, pihak LSP biasanya mencari dana talangan untuk penyelenggaraan kegiatan, dana tersebut bisa dari sekolah, koperasi bahkan dan pribadi. Solusi lain, LSP melaksanakan

kegiatan tanpa memberi talangan dana tapi beberapa pihak ditunda pembayarannya sampai dana cair dari pemerintah. Kedua pilihan solusi tersebut sama-sama mengandung risiko, di samping menggambarkan manajemen yang kurang sehat. Memungkinkan ada pihak-pihak yang dirugikan, hal tersebut kurang layak untuk terjadi. BNSP adalah sebuah badan yang bergelut dalam bidang manajemen terstandar. Pada pelaksanaannya ada sisi lain yang menggambarkan proses manajemen yang kurang terstandar dengan baik.

- 4) Keempat, permasalahan kurang meratanya pemahaman mengenai sertifikasi profesi di industri, LSP berusaha menyampaikan sosialisasi pada kesempatan yang memungkinkan, misalnya pada saat koordinasi Waka Hubun Humas dengan industri pada saat menjalin kerjasama atau pemetaan PKL. Tugas ini juga tugas pemerintah untuk mensinergikan pihak-pihak berkepentingan agar program revitalisasi SMK berhasil dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perencanaan dalam manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 3 dan SMKN 9 Bandung telah dirumuskan, divalidasi dan didokumentasikan dengan baik. Perencanaan itu berupa Visi Misi, program kerja yang dibuat dalam bentuk format yang memuat sasaran-sasaran, uraian kegiatan, target pencapaiannya, waktu pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang dibutuhkan serta penanggung jawab personal pelaksana kegiatan.
2. Pengorganisasian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMKN 3 dan SMKN 9 Bandung telah mengacu kepada standar BNSP serta sesuai dengan poin-poin yang diperlukan dalam manajemen. Pengorganisasian berupa proses penunjukkan personal, membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan tupoksinya. pencapaian tujuan organisasi.
3. Pelaksanaan pada manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 9 Bandung telah mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan

serta sesuai dengan standar BNSP dan fungsi pelaksanaan dalam manajemen. Kegiatannya berkaitan dengan manajemen organisasi dan pelaksanaan pengujian atau asesmen.

4. Kegiatan Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMKN 3 dan SMKN 9 Bandung telah dilaksanakan cukup baik. Kegiatannya mencakup dua point penting yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi terhadap manajemen LSP itu sendiri. Kegiatan evaluasi asesmen dilakukan setelah kegiatan berlangsung dan menjadi catatan dalam laporan kegiatan.
5. Kendala yang dihadapi dalam manajemen Lembaga sertifikasi Profesi di SMK adalah masalah kesesuaian program sekolah dengan pemerintah, masalah sumber daya serta masalah birokrasi. Permasalahan program, berupa jadwal pengujian yang tidak sinkron. Permasalahan sumber daya manusia, berupa pemenuhan kompetensi-kompetensi standar personal baik pengurus maupun asesor.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK berupaya mengatasi berbagai kendala yang muncul. Dari beberapa masalah tersebut ada yang bisa ditemukan solusinya dan dilaksanakan secara internal oleh sekolah, namun, ada juga kendala yang tidak bisa ditangani secara internal.

B. Saran

Beberapa saran disampaikan kepada: (1) pemerintah diantaranya Layanan evaluasi dalam hal ini audit eksternal oleh BNSP belum berjalan optimal, hal itu karena kurang seimbang rasio jumlah personal BNSP dengan jumlah LSP SMK yang terlisensi. Pemerintah sebaiknya mempersiapkan aspek yang berkaitan dengan program pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK. Terutama berkaitan dengan sumber daya manusia dan keuangan yang akan sangat diperlukan untuk kegiatan kontroling penyelenggaraan LSP. Kontrol yang baik dalam hal ini berupa audit eksternal akan menjadi penguat bagi LSP untuk bisa melaksanakan manajemen sesuai standar, (2) untuk Kepala sekolah sebaiknya berkelanjutan mengupayakan memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi, dukungan itu berupa dukungan moral dan material. Dukungan moral diberikan kepada semua stakeholder,

dukungan material berupa pengadaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan keuangan, (3) Pengurus LSP sebaiknya mempertahankan dan memelihara pemahaman atau kom-petensi mengenai standar penyelenggaraan manajemen LSP, selanjutnya bisa berinovasi dalam menjalin kemitraan sehingga mampu mengatasi masalah pendanaan untuk kelangsungan organisasi, administrasi senantiasa selalu melakukan surveillance terhadap asesi yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP sehingga data tenaga kerja tertelusur dengan baik. Selanjutnya pemutakhiran dokumen juga sebaiknya selalu dilakukan terkait dengan banyak kebijakan/regulasi baru yang berlaku, (4) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang penulis teliti, diharapkan dapat memperluas kajian dalam penelitian terutama yang berkaitan dengan umpan balik masyarakat dan DUDIKA terhadap lulusan SMK yang bersertifikat profesi, penelitian juga bisa dilakukan pada siswa berkaitan dengan pandangan mereka terhadap manfaat sertifikat profesi di DUDIKA.

DAFTAR RUJUKAN

- A.F.Stoner, J. DKK. (1996) *Manajemen* Edisi Indonesia Jakarta: PT.Prenhallindo.
- Ansyar, M. (1989). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: P2LPTK.
- Asmani, J. M. (2009). *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Athoillah, M.A. (2010) *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia.Yogyakarta: DIVA Press.
- Badrudin. (2013). *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, FE-Univ.Trunojoyo.
- BNSP. (2008). *Pedoman BNSP 304 : Pelaksanaan uji kompetensi oleh panitia teknis*. Jakarta.
- BNSP. (2014). *Pedoman BNSP 201: Pedoman penilaian kesesuaian-pesyaratan umum lembaga sertifikasi profesi*. Jakarta: BNSP.
- BNSP. (2014). *Pedoman BNSP 206: Persyaratan umum tempat uji kompetensi*. Jakarta: BNSP
- Bogdan, R. C. dan Biklen K. S. (1982) *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bogdan, R. dan Taylor, S.J. (1993). *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*, MIT Centre for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA
- Fatulloh, A., & Hendro, H. (2021). APLIKASI ASESMEN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLIBATAM BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Teknologi Terapan: G-Tech*, 5(1), 353-366.
- Handyaningrat, S. (1993). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 *Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
- Karyana, H. (2018) *Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak di SMK Negeri 1 Purworejo*
- Kepmenakertrans No. Rep.227/MEN/2003 *Tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*.
- Kuntoro, T. (2020) *Evaluasi Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Oleh LSP-P3 di Kabupaten Banyumas Menggunaka Model CIPP*
- Mamoon, D. (2007). "Macro Economic Uncertainty of 1990s and Volatility at Karachi Stock Exchange". Munich Personal RePEc Archive Paper, No. 3219 Mei.
- Margono. (2002). *Metode penelitian pendidikan* Jakarta : Rineka Cipta
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2008). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya

- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi. (1983). *Administrasi Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Pasyah, A. C., Nurdin, M., & Purnomo, P. (2021). Analisis Efektifitas Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. *Meteor STIP Marunda*, 14(2), 52-66.
- Permendikbud. Nomor 34 tahun 2018 *tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Kejuruan*
- Putra, F. H. P. (2017). Sistem Informasi Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi STIKI Malang untuk Pengelolaan Sertifikasi TIK. *J-INTECH*, 5(01), 71-77. 11.00 2/22
- Rohayati, (2019). *Manajemen Pembelajaran Produktif Berstandar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam Meningkatkan Daya Saing Lulusan SMK*.
- Sa'ud, U.Y. dan Makmun, A.Sy. (2005). *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Education in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, Terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, Yogyakarta: IRCiSoD
- Sanusi, A. (2015). *Sistem Nilai*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Setyowati, W. (2017). Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sebagai Sarana Peningkatan Sumber Daya Manusia Kompeten. *Jurnal Penamas*, 1(1).
- Sidqiyah, C., & Rahayu, E. (2020). PROSES ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI BAGI COMMUNITY WORKER DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSP FPM). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 1.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitorus, R.A. (2016). *Tantangan dan Harapan Pendidikan Kejuruan di Indonesia dalam mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan yang Memiliki Daya Saing Ketenagakerjaan*.
- Tersedia:
[http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/tendik_1/RITA ANDRIANISITORUS.S.Sos_16112016004200.pdf](http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/tendik_1/RITA%20ANDRIANISITORUS.S.Sos_16112016004200.pdf) (12 Februari 2021)
- Slamet, M., & Mulyoto, M. (2021). Manajemen Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Negeri 1 Kebumen. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(2), 203-213.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.Sy. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N.Sy. et, al. (2007). *Panduan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Program Pascasarjana UNINUS
- Sule, E.T. & Saefullah, K. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Surakhmad, W. (1996). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Susrama, I. G., Sampurno, I. A. W., & Sugiarto, S. (2020). SISTEM TERINTEGRASI UJI KOMPETENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI. *Jurnal Penelitian*, 5(3), 181-191.
- Terry, G.R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winardi. (2014). *Teori organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wineburg, S. (2006). *Berfikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wirawan, I.B. (2006). *Analisis keputusan TKI bekerja ke luar negeri* (Studi Kasus: Kabupaten Malang). Surabaya: Universitas Airlangga.